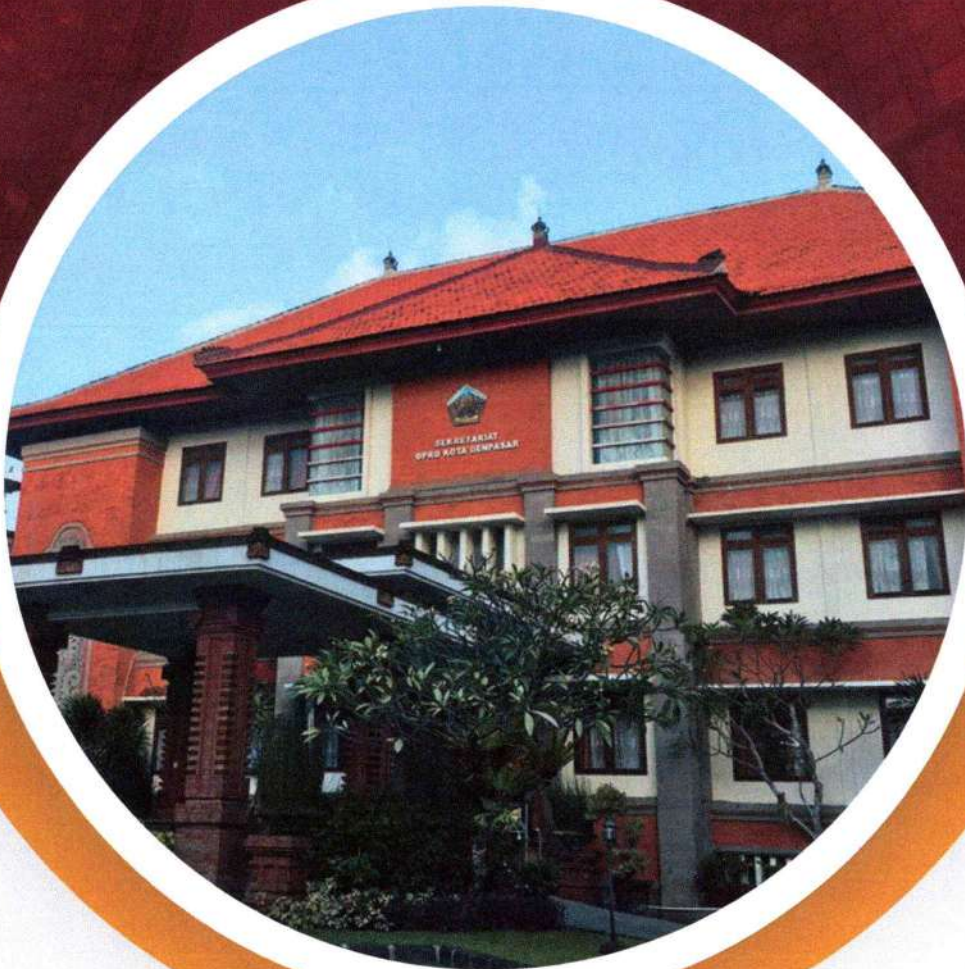




PEMERINTAH
KOTA DENPASAR


RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



 www.dprd.denpasarkota.go.id

 dprdkotadps@gmail.com

 (0361) 237919, 237920 Fax 237921

 Jl Melati No 17 Denpasar



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 JUNI 2025

NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan program dan kegiatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi upaya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 dan target kinerja RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya kami berharap penyusunan Rencana Kerja ini, dapat merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik pada tahun anggaran 2025.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 10 Juni 2025

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM

Pembina Tk. II/ Gol IV/b

NIP. 196811141998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	5
2.1 Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.2 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	7
2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR	9
3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	9
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	5
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	11
Tabel 3.2 Penjelasan Perubahan Target Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 3.3 Penjelasan Perubahan Pendanaan Tahun 2025	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra dan Renja. Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Penyusunan perubahan renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 harus berpedoman pada perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administratif keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 25 Maret 2025. Namun, Sekretariat DPRD Kota Denpasar hanya ikut berpartisipasi melakukan pergeseran sebanyak 2 (dua) kali, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 17 Maret 2025. Besaran pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp 105.502.172.370,- mengalami penyesuaian/pergeseran menjadi Rp 88.787.383.996,- dengan tetap melaksanakan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan.

Realisasi fisik kegiatan sebesar 29,79% dengan serapan anggaran sebesar 18,03% atau Rp 16.011.660.544,- dari Rp 88.787.383.996,-.

Memperhatikan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025, perlu dipertimbangkan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja terhadap proyeksi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 30);

22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah untuk kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun anggaran 2025,
2. Merumuskan perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar selama tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menyajikan kajian (review) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menyajikan rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV Penutup, simpulan menyeluruh dari Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB II

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome dari tingkat sasaran strategis hingga ke tingkat sub kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat digunakan sebagai pembanding kinerja untuk tahun 2025. Capaian kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 100% yang dilakukan dengan 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik tahun 2024 sebesar 98,83%, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 94.524.814.582,- dan serapan anggaran sebesar Rp 75.085.899.678,- atau sebesar 79.44%.

2.1 Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	66.482.474.370	43,50 %	14.092.761.657	52.389.712.713
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	10.004.261.528	95,74 %	2.151.418.796	7.852.842.732
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	10.004.261.528	45 Orang/Bulan	2.151.418.796	7.852.842.732
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	3.455.565.700	42,53 %	373.936.400	3.081.629.300
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1.999.732.600	6 Paket	238.240.000	1.761.492.600
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	97.219.500	2 Paket	7.852.500	89.367.000
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	245.235.600	1 Paket	6.625.500	238.610.100
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	111.930.000	1 Paket	1.562.400	110.367.600
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	168 Dokumen	702.426.000	39 Dokumen	115.231.000	587.195.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	170.700.000	3 Laporan	4.050.000	166.650.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	128.322.000	2 Laporan	375.000	127.947.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	3.222.037.770	25 %	406.617.369	2.815.420.401
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	602.400.000	3 Laporan	83.017.369	519.382.631
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.619.637.770	3 Laporan	323.600.000	2.296.037.770

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.632.002.000	43,92 %	161.258.600	2.470.743.400
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	385.352.000	5 unit	68.800.000	316.552.000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	799.890.000	28 unit	32.223.000	767.667.000
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 unit	275.560.000	0 unit	11.000.000	264.560.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19 unit	1.171.200.000	0 unit	49.235.600	1.121.964.400
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	46.730.465.372	33,33 %	10.989.342.492	35.741.122.880
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45.594.462.872	45 Orang/Bulan	10.989.342.492	34.605.120.380
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket	960.565.000	0 Paket	-	960.565.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	175.437.500	0 Orang	-	175.437.500
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	438.142.000	20,45 %	10.188.000	427.954.000
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	3.750.000	0 Laporan	-	3.750.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	434.392.000	9 Laporan	10.188.000	424.204.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	39.019.698.000	16,09 %	1.919.898.887	37.100.799.113
		Persentase kepuasan layanan sekretariat DPRD	87,5 %		90,56 %	-	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	2.243.934.000	5,56 %	-	2.243.934.000
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	366.588.000	2 Dokumen	-	366.588.000
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.755.596.000	0 Dokumen	-	1.755.596.000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	121.750.000	0 Dokumen	-	121.750.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	566.628.000	0 %	-	566.628.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	9.000.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	9.000.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	530.628.000	0 Dokumen	-	530.628.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	9.000.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	9.000.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	13.495.200.000	35,12 %	1.853.744.847	11.641.455.153
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.120.013.000	13 Laporan	422.312.648	2.697.700.352
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.522.683.000	15 Laporan	412.926.813	3.109.756.187
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.317.019.000	14 Laporan	539.175.086	2.777.843.914
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.520.485.000	17 Laporan	479.330.300	3.041.154.700
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	-	3.000.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	-	3.000.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	9.000.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.644.350.000	30,28 %	53.750.180	4.590.599.820

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.992.762.000	1 Dokumen	11.825.180	2.980.936.820
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	518.400.000	2 Orang	-	518.400.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	259.200.000	2 Orang	-	259.200.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	129.000.000	3 Dokumen	11.175.000	117.825.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	436.988.000	5 Dokumen	750.000	436.238.000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	308.000.000	3 Dokumen	30.000.000	278.000.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	3.442.500.000	33,33 %	-	3.442.500.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000	1 Dokumen	-	3.442.500.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	196.228.000	0 %	-	196.228.000
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	196.228.000	0 Laporan	-	196.228.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	14.430.858.000	8,33 %	11.403.860	14.419.454.140
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	14.430.858.000	1 Dokumen	11.403.860	14.419.454.140
JUMLAH			100 %	105.502.172.370	29,79 %	16.011.660.544	89.490.511.826

Pagu anggaran tahun 2025 pada Tabel 2.1 berpedoman pada APBD Induk Tahun 2025 sesuai DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 27 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 105.502.172.370,-. Selama triwulan I tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah melaksanakan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Pergeseran ke-1 yang telah ditetapkan dengan DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 17 Februari 2025 dilakukan karena adanya penyesuaian belanja pegawai (PPP) dengan penambahan anggaran sebesar Rp 276.439.614,- serta pergeseran antarjenis pada komponen belanja perjalanan dinas sehingga pagu anggaran menjadi Rp105.778.611.984,-. Pergeseran ke-2 telah ditetapkan dengan DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran pergeseran ke-2 berkurang sebesar Rp16.714.788.374,- menjadi Rp 88.787.383.996,-

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi secara general dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Adapun kendala/permasalahan teknis yang terjadi selama Triwulan I Tahun 2025 adalah :

1. Pekerjaan pemeliharaan bangunan/gedung dan belanja modal (pembuatan gazebo) yang belum dapat diproses karena standar harga pada Perwali Kota Denpasar Nomor 58 Tahun 2025 tentang standar harga jasa tahun anggaran 2025 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2025 tentang standar biaya jasa tahun anggaran 2025 tidak mengakomodir usulan RKBMD sebagaimana dimaksud. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Pekerjaan pengadaan belanja modal yang tidak ada memiliki sertifikat TKDN belum dapat diproses karena terkendala dalam penyusunan kajian pengadaan import dari tim P3DN Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Hal tersebut karena belum memadai kompetensi SDM tentang P3DN. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Adanya perubahan kebijakan penggunaan dari katalog versi 5 menjadi katalog versi 6, menyebabkan beberapa pengadaan barang dan jasa terkendala. Sehingga berpotensi belum optimalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Adapun rencana perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi :

1. Meningkatkan koordinasi baik dengan dinas seperti BPKAD/ Bagian PBJ/ Inspektorat/ BPK, dsb untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi/ pelatihan kantor sendiri/ bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Melakukan monev secara berkala melalui survei kepuasan pelayanan publik dan melaksanakan forum konsultasi publik dengan memperluas cangkupan peserta/ stakeholder dalam penyelenggaraan diskusi/ forum agar layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD diberikan secara optimal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan diambil dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 adalah melakukan pencermatan dalam perumusan target kinerja, pencermatan pengukuran output kinerja sesuai evidence / bukti pendukung yang akurat, dan pencermatan anggaran sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan terakhir adalah sebagai berikut.

- a. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 5) adalah "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD". Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yakni:
 - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
 - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
 - menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi (Lampiran I) yaitu:
 - penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
 - penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
 - fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD,
 - penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
 - penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 16) terdiri dari:
 - Sekretaris DPRD,
 - Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
 - Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
 - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/117/Sekret.DPRD/2024 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP), terdapat 8 (delapan) jenis pelayanan yang ditetapkan yaitu :

- Pelayanan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
- Pelayanan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- Pelayanan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD
- Pelayanan pelaksanaan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD
- Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah
- Pelayanan penerimaan kunjungan tamu kerja
- Pelayanan pengaduan masyarakat secara online

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Berikut penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025:

Visi	:	Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju
Misi ke-3	:	Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
- Indikator Kinerja	➤	<i>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</i>
Sasaran Strategis	:	Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD
- Indikator Kinerja Utama	➤	<i>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i>
Strategi	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Arah Kebijakan	:	1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada Tahun 2025, seiring perjalanan terdapat penyesuaian yang bertujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, kegiatan prioritas, dan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan maka ditetapkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu tetap terdiri dari 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dimaksud. Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	66.482.474.370	67.411.201.150	928.726.780
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	10.004.261.528	10.780.821.430	776.559.902
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	10.004.261.528	10.780.821.430	776.559.902
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	100 %	3.455.565.700	3.455.682.350	116.650
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20 Paket	1.999.732.600	1.987.051.250	-12.681.350
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	97.219.500	93.407.500	-3.812.000
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	245.235.600	245.235.600	0
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	111.930.000	100.100.000	-11.830.000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	168 Dokumen	14 Dokumen	702.426.000	703.866.000	1.440.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	170.700.000	197.700.000	27.000.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	128.322.000	128.322.000	0
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	100 %	3.222.037.770	3.436.137.998	214.100.228
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	602.400.000	554.400.000	-48.000.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.619.637.770	2.881.737.998	262.100.228
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.632.002.000	2.517.602.000	-114.400.000
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	385.352.000	385.352.000	0
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	32 unit	799.890.000	685.490.000	-114.400.000
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 unit	283 unit	275.560.000	275.560.000	0
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19 unit	13 unit	1.171.200.000	1.171.200.000	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	46.730.465.372	46.730.465.372	0
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45.594.462.872	45.594.462.872	0
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket	4 paket	960.565.000	960.565.000	0
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	175.437.500	175.437.500	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	100 %	438.142.000	490.492.000	52.350.000
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	4 Laporan	3.750.000	3.000.000	-750.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	22 Laporan	434.392.000	487.492.000	53.100.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	100 %	39.019.698.000	34.210.417.750	-4.809.280.250
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,5 %	90,04 %			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	2.243.934.000	2.614.067.000	370.133.000
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	366.588.000	358.064.000	-8.524.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	1.755.596.000	2.184.328.000	428.732.000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	121.750.000	71.675.000	-50.075.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	566.628.000	577.748.000	11.120.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	6.600.000	-2.400.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	6.600.000	-2.400.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	530.628.000	551.348.000	20.720.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	6.600.000	-2.400.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	6.600.000	-2.400.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	100 %	13.495.200.000	15.054.465.000	1.559.265.000
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	24 Laporan	3.120.013.000	3.478.857.000	358.844.000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	24 Laporan	3.522.683.000	3.898.461.000	375.778.000
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	24 Laporan	3.317.019.000	3.786.701.000	469.682.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	24 Laporan	3.520.485.000	3.888.421.000	367.936.000
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.500.000	-1.500.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000	0	-3.000.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	525.000	-8.475.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	4.644.350.000	4.477.478.000	-166.872.000
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.992.762.000	2.992.762.000	0
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	4 Orang	518.400.000	388.800.000	-129.600.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	2 Orang	259.200.000	216.000.000	-43.200.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	129.000.000	124.500.000	-4.500.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	436.988.000	460.816.000	23.828.000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	308.000.000	294.600.000	-13.400.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100 %	196.228.000	209.744.000	13.516.000
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	196.228.000	209.744.000	13.516.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	14.430.858.000	8.036.915.750	-6.393.942.250
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	14.430.858.000	8.036.915.750	-6.393.942.250
JUMLAH			100 %	100 %	105.502.172.370	101.621.618.900	-3.880.553.470

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan dengan perkiraan biaya pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 101.621.618.900,-. Sedangkan pada APBD Induk Tahun 2025 tersedia anggaran sebesar Rp 105.502.172.370,-. Namun, terdapat rasionalisasi dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersedia anggaran sebesar Rp 88.787.383.996. Untuk mencapai target kinerja yang ditarget pada tahun 2025, tidak ada perubahan perkiraan biaya dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 101.621.618.900,-. Namun, terdapat perubahan target kinerja dari rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dari rancangan awal target kinerja Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD sebesar 87.5% sesuai target Renstra Tahun 2021-2026, disesuaikan berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 88.91%. Penetapan target kinerja diperhitungkan menggunakan tren capaian kinerja beberapa periode sebelumnya.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rancangan awal target kinerja 46 orang/bulan menjadi 70 orang/bulan. Hal tersebut disebabkan karena penambahan 25 orang PPPK Tahap 1 yang akan dilantik pada pertengahan tahun 2025.
3. Pengawasan Penggunaan Anggaran, dari rancangan awal target kinerja 2 dokumen menjadi 0 dokumen. Hal tersebut karena sub kegiatan diefisiensi dengan pelaksanaan dilakukan secara sekaligus melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja masing-masing komisi.
4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, dari rancangan awal target kinerja 2 orang menjadi 4 orang. Hal tersebut disebabkan karena penyediaan sesuai kebutuhan.
5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dari 4 orang menjadi 2 orang. Hal tersebut disebabkan karena penyediaan sesuai kebutuhan.

Berikut penjelasan perubahan target kinerja :

Tabel 3.2 Penjelasan Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Keterangan
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah PNS yang menerima pada Maret 2025 sebanyak 45 orang dan penambahan jumlah PPPK Tahap 1 yang akan dilantik pada tahun 2025 sebanyak 25 orang
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	100 %	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20 Paket	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah paket sesuai usulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah paket sesuai usulan pengadaan bahan logistik kantor
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	168 Dokumen	14 Dokumen	Perubahan target kinerja karena perhitungan kinerja seharusnya berdasarkan jenis penyediaan bahan bacaan
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	100 %	

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Keterangan
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	32 unit	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kepemilikan alat angkutan yang tercatat dalam KIB B yaitu terdiri 3 unit roda 4 untuk Kepala Bagian, 9 unit roda 4 untuk operasional, 4 unit motor listrik, dan 16 unit roda 2
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 unit	283 unit	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah aset yang akan dipelihara berdasarkan usulan rkmd
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	13 unit	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kepemilikan Gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket	4 paket	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	100 %	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	4 Laporan	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan jumlah fraksi DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.1.4.2/105/DPRD/2024 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Masa Jabatan 2024-2029
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	22 Laporan	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	100 %	
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,5 %	90,04 %	Perubahan target kinerja disesuaikan berdasarkan capaian kinerja kepuasan layanan tahun 2024 sebesar 86,91, penetapan perubahan target diperhitungkan berdasarkan tren periode sebelumnya maka diperoteh 90,04.
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Atau Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan ranperda inisiatif DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.1/12 /DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	100 %	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	24 Laporan	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	24 Laporan	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	24 Laporan	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	24 Laporan	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	Perubahan target kinerja karena penyampaian hasil pemeriksaan BPK tanpa pembahasan kepada DPRD dan pelaksanaannya bersifat tentative
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	Penghapusan subkegiatan karena pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran dilaksanakan secara sekaligus melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja masing-masing komisi
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	Perubahan target kinerja karena fasilitasi pembahasan LKPJ Kota Denpasar tahun 2024 telah berakhir pada April 2025 yang menghasilkan 1 dokumen rekomendasi hasil pembahasan LKPJ oleh Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Keterangan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	4 Orang	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kebutuhan berdasarkan : - Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/02/Sekret.DPRD tentang Penetapan dan Penugasan Tim Ahli/Kelompok Pakar Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 2 orang - Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/03/Sekret.DPRD tentang Penetapan dan Penugasan Tim Ahli/Kelompok Pakar Pimpinan DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 2 orang
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	2 Orang	Perubahan target kinerja karena menyesuaikan kebutuhan berdasarkan : - Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/04/Sekret.DPRD tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1 orang - Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/05/Sekret.DPRD tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1 orang
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100 %	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	
JUMLAH			100 %	100 %	

Berikut penjelasan perubahan pendanaan :

Tabel 3.3 Penjelasan Perubahan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertamba/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	66.482.474.370	65.602.178.246	67.411.201.150	1.809.022.904	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	10.004.261.528	9.285.048.404	10.780.821.430	1.495.773.026	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.004.261.528	9.285.048.404	10.780.821.430	1.495.773.026	Penambahan pendanaan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dari 5 bulan menjadi 7 bulan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	3.455.565.700	3.390.832.700	3.455.682.350	64.849.650	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.999.732.600	1.953.641.600	1.987.051.250	33.409.650	Penambahan belanja modal
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	97.219.500	93.407.500	93.407.500	0	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	245.235.600	245.235.600	245.235.600	0	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	111.930.000	100.100.000	100.100.000	0	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	702.426.000	702.426.000	703.866.000	1.440.000	Penambahan langganan surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan yang belum dianggarkan sampai dengan Desember 2025
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.700.000	167.700.000	197.700.000	30.000.000	Penambahan belanja makanan dan minuman
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.322.000	128.322.000	128.322.000	0	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	3.222.037.770	3.173.337.770	3.436.137.998	262.800.228	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	602.400.000	554.400.000	554.400.000	0	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.619.637.770	2.618.937.770	2.681.737.998	262.800.228	Perubahan pendanaan karena : 1. Penambahan luran pengelolaan sampah selama 5 bulan 2. Penambahan Jasa Appraisal dalam rangka perubahan Perwali Kota Denpasar Nomor 15 tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Rasionalisasi jasa outsourcing sopir dan tukang kebun yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.632.002.000	2.632.002.000	2.517.602.000	-114.400.000	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	385.352.000	385.352.000	385.352.000	0	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	799.890.000	799.890.000	665.490.000	-114.400.000	Perubahan pendanaan karena penyesuaian target kinerja sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan penyediaan BBM untuk kendaraan operasional dari 13 unit menjadi 10 unit
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	275.560.000	275.560.000	275.560.000	0	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.171.200.000	1.171.200.000	1.171.200.000	0	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.730.465.372	46.730.465.372	46.730.465.372	0	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45.594.462.872	45.594.462.872	45.594.462.872	0	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	960.565.000	960.565.000	960.565.000	0	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	175.437.500	175.437.500	175.437.500	0	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	438.142.000	390.492.000	490.492.000	100.000.000	
4.02.01.2.16.0002	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	3.750.000	3.000.000	3.000.000	0	
4.02.01.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	434.392.000	387.492.000	487.492.000	100.000.000	Penambahan belanja makanan dan minuman
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	39.019.698.000	23.185.205.750	34.210.417.750	11.025.212.000	
		Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD					
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.243.934.000	1.421.157.000	2.614.067.000	1.192.910.000	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	366.588.000	239.410.000	358.064.000	118.654.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Bapemperda dan belanja makanan dan minuman rapat kerja Bapemperda
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.755.596.000	1.060.072.000	2.184.328.000	1.124.256.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Pansus
4.02.02.2.01.0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	121.750.000	121.675.000	71.675.000	-50.000.000	Perubahan pendanaan karena menyesuaikan ranperda inisiatif DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.1/112 /DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	566.628.000	383.906.000	577.748.000	193.842.000	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	9.000.000	6.600.000	6.600.000	0	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.000.000	6.600.000	6.600.000	0	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	530.628.000	357.506.000	551.348.000	193.842.000	Penambahan belanja perjalanan dinas badan anggaran
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	9.000.000	6.600.000	6.600.000	0	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.000.000	6.600.000	6.600.000	0	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	13.495.200.000	6.197.842.000	15.054.465.000	8.856.623.000	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	3.120.013.000	1.447.541.000	3.478.857.000	2.031.316.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi I DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.522.683.000	1.557.135.000	3.898.461.000	2.341.326.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi III DPRD
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.317.019.000	1.612.985.000	3.786.701.000	2.173.716.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi IV DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.520.485.000	1.570.581.000	3.888.421.000	2.317.840.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Komisi II DPRD

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			Induk	Pergeseran ke-2			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.000.000	0	0	0	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9.000.000	8.100.000	525.000	-7.575.000	Rasionalisasi karena fasilitasi rapat LKPJ telah selesai dilaksanakan pada April 2025
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	4.644.350.000	4.490.992.000	4.477.478.000	-13.514.000	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.992.762.000	2.992.762.000	2.992.762.000	0	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	518.400.000	518.400.000	388.800.000	-129.600.000	Rasionalisasi kelompok pakar / tim ahli AKD yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	259.200.000	259.200.000	216.000.000	-43.200.000	Rasionalisasi tenaga ahli fraksi yang tidak direalisasikan pada Januari sd April 2025
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	129.000.000	124.500.000	124.500.000	0	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	436.988.000	301.530.000	460.816.000	159.286.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Bamus dan belanja makanan dan minuman rapat kerja Bapemperta
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	308.000.000	294.600.000	294.600.000	0	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.442.500.000	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3.442.500.000	3.442.500.000	3.240.000.000	-202.500.000	Rasionalisasi pendanaan belanja makanan dan minuman pelaksanaan Reses pada masa sidang I tahun 2025 yang tidak direalisasikan pada 8-10 Maret 2025
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	196.228.000	145.330.000	209.744.000	64.414.000	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	196.228.000	145.330.000	209.744.000	64.414.000	Penambahan belanja perjalanan dinas Badan Kehormatan DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	14.430.858.000	7.103.478.750	8.036.915.750	933.437.000	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.430.858.000	7.103.478.750	8.036.915.750	933.437.000	Perubahan pendanaan karena : 1. Penambahan penyediaan buku agenda DPRD untuk tahun 2026 2. Penambahan belanja perjalanan dinas Pimpinan DPRD 3. Penambahan belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Munas/Rakor Asosiasi DPRD se Indonesia (ADEKSI)
JUMLAH			105.502.172.370	88.787.383.996	105.502.172.370	12.834.234.904	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Perumusan Perubahan Rencana Kerja ini digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yaitu capaian realisasi fisik kegiatan sebesar 29,79%. Berdasarkan pagu anggaran pergeseran ke-2 yang ditetapkan pada 18 Maret 2025 sebesar Rp 88.787.383.996,- dengan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 18,03% (Rp 16.011.660.544,-) atau capaian serapan anggaran sebesar 72,73% dari target anggaran kas pergeseran ke-2 (sampai dengan Triwulan I Tahun 2025) sebesar Rp 22.016.572.194.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tidak mengalami perubahan dengan rincian 2 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 berkurang sebesar Rp 3.880.553.470,- dari APBD Induk. Namun, jika dibandingkan dengan APBD Pergeseran Ke-2 perkiraan biaya meningkat sebesar Rp 12.834.234.904,- sehingga pagu anggaran perubahan rencana kerja tahun 2025 menjadi Rp 101.621.618.900,-.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 10 Juni 2025

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I / IVb

NIP. 196811141998031003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 10 Juni 2025

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 196811141998031003